

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal Fiji dalam bentuk pinjaman dengan rasio utang tinggi pada periode 2020–2024 dapat dipahami sebagai praktik sekuritisasi negara dalam merespons krisis iklim yang mengancam pembangunan nasional. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena Fiji merupakan salah satu negara kepulauan kecil yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim, namun pada saat yang sama mengalami peningkatan rasio utang publik yang signifikan selama periode penelitian. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan et al. (1998) sebagai kerangka analisis guna menelaah bagaimana pemerintah Fiji mengonstruksikan krisis iklim sebagai ancaman, mengidentifikasi pihak yang diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi, melihat bagaimana ancaman tersebut diterima oleh audiens, serta memahami bagaimana kebijakan fiskal Fiji dalam bentuk rasio utang tinggi dapat dijelaskan melalui proses sekuritisasi tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi ancaman yang mempengaruhi pembangunan nasional Fiji. Ancaman tersebut tidak hanya terlihat melalui meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti siklon tropis, banjir, dan kenaikan permukaan laut, tetapi juga melalui kerugian ekonomi yang besar, kerusakan infrastruktur, relokasi masyarakat pesisir, terganggunya aktivitas ekonomi nasional, serta meningkatnya tekanan terhadap kapasitas pembangunan negara. Berbagai laporan pemerintah Fiji dan organisasi internasional menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi terbatas pada persoalan lingkungan semata, melainkan telah mempengaruhi stabilitas ekonomi, kapasitas fiskal, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Dengan demikian, selama periode 2020–2024 pemerintah Fiji menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan, yaitu meningkatnya ancaman

perubahan iklim dan memburuknya kondisi ekonomi nasional. Situasi inilah yang kemudian menjadi konteks penting dalam memahami arah kebijakan fiskal Fiji selama periode penelitian.

Berdasarkan teori Sekuritisasi Barry Buzan et al. (1998), penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Fiji secara konsisten mengonstruksikan krisis iklim sebagai ancaman terhadap pembangunan nasional melalui berbagai *speech act* yang disampaikan oleh sejumlah aktor pemerintah. Dalam penelitian ini ditemukan adanya multi-securitizing actor yang terdiri atas Josaia Voreqe Bainimarama, Aiyaz Sayed-Khaiyum, dan Sitiveni Rabuka. Ketiga aktor tersebut memiliki akses dalam instrumen politik sehingga memiliki legitimasi untuk menyampaikan klaim ancaman sekaligus mempengaruhi arah kebijakan negara. Mengacu pada berbagai *speech act* yang dianalisis, ketiga aktor tersebut secara konsisten menggambarkan krisis iklim sebagai ancaman yang menghambat pembangunan nasional, serta membahayakan kesejahteraan masyarakat Fiji. Temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi ancaman di Fiji tidak bergantung pada satu tokoh ataupun satu periode pemerintahan, melainkan telah menjadi narasi yang dipertahankan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Dengan demikian, krisis iklim tidak lagi diposisikan sebagai isu lingkungan semata, tetapi telah dipahami sebagai persoalan yang memerlukan perhatian politik dan kebijakan yang lebih besar.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa berbagai *speech act* yang disampaikan oleh pemerintah Fiji menunjukkan adanya upaya yang konsisten untuk membingkai krisis iklim sebagai *existential threat* sebagaimana dijelaskan dalam teori Sekuritisasi. Ancaman yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan terganggunya pembangunan nasional, meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana, menurunnya kapasitas negara, hilangnya wilayah pesisir, relokasi masyarakat, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya negara. Melalui konstruksi tersebut, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi merupakan risiko jangka panjang yang bersifat abstrak, melainkan ancaman nyata yang telah mempengaruhi keberlangsungan pembangunan Fiji. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa pemerintah Fiji berhasil menggeser krisis iklim dari isu

pembangunan menuju isu yang memiliki dimensi keamanan, sehingga memperoleh tingkat urgensi yang lebih tinggi dalam agenda kebijakan negara.

Dalam elemen *referent object*, penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua entitas utama yang secara konsisten diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi, yaitu masyarakat Fiji dan pembangunan nasional Fiji. Masyarakat Fiji menjadi referent object karena merupakan pihak yang paling merasakan dampak krisis iklim melalui kehilangan tempat tinggal, relokasi komunitas pesisir, terganggunya mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi. Sementara itu, pembangunan nasional Fiji menjadi *referent object* karena krisis iklim telah mempengaruhi kemampuan negara dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, mempertahankan stabilitas fiskal, dan melanjutkan agenda pembangunan jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Fiji tidak hanya mengonstruksikan krisis iklim sebagai ancaman terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kedua referent object tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam membangun urgensi penanganan krisis iklim.

Dalam elemen *audience*, Penelitian ini menempatkan masyarakat Fiji yang direpresentasikan oleh *Parliament of Fiji* sebagai audiens dalam proses sekuritisasi perubahan iklim, di mana penerimaan mereka sangat penting untuk memberikan pemerintah legitimasi politik untuk menetapkan berbagai kebijakan, regulasi, menyetujui anggaran, dan mengarahkan prioritas pembangunan. Sehingga, penerimaan *audience* menjadi penting karena menunjukkan adanya mandat domestik yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta menggerakkan partisipasi sektor swasta dalam mendukung agenda adaptasi, mitigasi, dan pembangunan ketahanan iklim. Bukti audience acceptance terlihat dari beberapa hal yaitu, pengesahan undang-undang *Climate Change Act 2021* yang secara eksplisit menyebut perubahan iklim sebagai *climate emergency* dan ancaman terbesar bagi Fiji, pergeseran fokus pembahasan di Standing Committee on Justice, Law and Human Rights dari mempertanyakan keberadaan ancaman menjadi membahas respons kebijakan terhadapnya, dukungan lintas partai dalam sidang parlemen (termasuk

dari pihak oposisi) terhadap isu ini tanpa mempersoalkan validitasnya, persetujuan alokasi anggaran negara untuk pemulihan bencana dan program adaptasi iklim, serta dimasukkannya perubahan iklim sebagai risiko fiskal utama dalam Medium Term Fiscal Strategy. Akan tetapi, ketika proses tersebut dikaitkan dengan fokus utama penelitian, yaitu kebijakan fiskal dalam bentuk pinjaman dengan rasio utang tinggi, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Fiji belum secara eksplisit mengonstruksikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari *extraordinary measures*. Meskipun peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat krisis iklim menjadi salah satu konteks yang melatarbelakangi meningkatnya rasio utang publik, berbagai *speech act* maupun dokumen resmi pemerintah tidak menunjukkan adanya upaya untuk membingkai pinjaman dengan rasio utang tinggi sebagai respons keamanan yang memerlukan legitimasi khusus.

Sehingga, pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan fiskal Fiji dalam bentuk pinjaman dengan rasio utang tinggi pada periode 2020–2024 dapat dipahami sebagai praktik sekuritisasi negara dalam merespons krisis iklim yang mengancam pembangunan nasional dijawab melalui temuan bahwa proses sekuritisasi di Fiji berlangsung hingga tahap konstruksi ancaman, tetapi belum berlanjut pada tahap konstruksi respons. Pemerintah Fiji berhasil mengonstruksikan krisis iklim sebagai ancaman terhadap masyarakat dan pembangunan nasional melalui berbagai *speech act* yang kemudian memperoleh legitimasi domestik dari audience, sehingga pemerintah memiliki mandat untuk mengarahkan kebijakan serta memobilisasi sumber daya nasional dalam menghadapi krisis iklim. Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan adanya upaya pemerintah untuk secara eksplisit mengonstruksikan kebijakan pinjaman dengan rasio utang tinggi sebagai respons keamanan maupun sebagai *extraordinary measures*. Dengan kata lain, yang berhasil dikonstruksikan oleh pemerintah adalah ancamannya, sedangkan konstruksi terhadap respons, khususnya dalam bentuk kebijakan pinjaman dengan rasio utang tinggi, belum ditemukan dalam berbagai *speech act* maupun dokumen resmi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses sekuritisasi dalam kasus Fiji belum mencapai tahap konstruksi respons berupa kebijakan utang sebagai *extraordinary measures*, meskipun konstruksi ancaman dan perolehan legitimasi

domestik telah berlangsung secara kuat.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai bagaimana kebijakan fiskal Fiji dalam bentuk pinjaman dengan rasio utang tinggi pada periode 2020–2024 dapat dipahami sebagai praktik sekuritisasi negara dalam merespons krisis iklim yang mengancam pembangunan nasionalnya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Saran-saran ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu saran praktis dan saran akademis.

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran praktis yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah Fiji dalam memperkuat respons terhadap ancaman perubahan iklim serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan pembangunan nasional.

Pertama, pemerintah Fiji perlu meningkatkan transparansi mengenai keterkaitan antara ancaman perubahan iklim dan kebijakan fiskal negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Fiji secara konsisten mengonstruksikan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap masyarakat dan pembangunan nasional melalui berbagai speech act yang disampaikan oleh aktor-aktor pemerintah. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara narasi ancaman perubahan iklim dan kebijakan fiskal belum dijelaskan secara komprehensif dalam berbagai dokumen maupun pernyataan resmi pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya untuk memahami bagaimana prioritas pembiayaan iklim diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, pemerintah Fiji perlu memperkuat integrasi antara kebijakan perubahan iklim dan kebijakan fiskal melalui dokumen perencanaan, laporan pembiayaan, maupun mekanisme pelaporan publik yang lebih terstruktur sehingga penggunaan sumber pembiayaan negara dapat dipahami secara lebih jelas oleh masyarakat dan mitra internasional.

Kedua, pemerintah Fiji perlu terus memperkuat strategi pembangunan yang berorientasi pada ketahanan iklim (*climate resilience*) sebagai bagian dari

agenda pembangunan nasional jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi, kapasitas fiskal negara, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya kerentanan Fiji terhadap siklon tropis, banjir, dan kenaikan permukaan laut menunjukkan bahwa biaya yang harus ditanggung negara akan terus meningkat apabila upaya adaptasi dan mitigasi tidak diperkuat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tahan iklim, penguatan sistem mitigasi bencana, perlindungan terhadap komunitas rentan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi risiko iklim perlu terus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Fiji guna mengurangi kerentanan jangka panjang negara terhadap dampak perubahan iklim.

Ketiga, pemerintah Fiji perlu memperluas akses terhadap berbagai sumber pembiayaan internasional yang berorientasi pada perubahan iklim guna mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal domestik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pembangunan ketahanan iklim di Fiji terus meningkat, sementara kapasitas fiskal yang dimiliki negara relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan berbasis utang untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan pemulihan. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap climate finance, hibah internasional, mekanisme loss and damage funding, maupun berbagai skema pembiayaan pembangunan lainnya perlu terus dioptimalkan agar kebutuhan pembiayaan iklim tidak sepenuhnya bergantung pada peningkatan utang publik. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal Fiji sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan nasional tetap dapat berjalan secara optimal di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

6.2.2 Saran Akademis

Selain saran praktis, penelitian ini juga memberikan sejumlah saran akademis yang diharapkan dapat mendukung pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi sekuritisasi perubahan iklim, keamanan non-tradisional, dan ekonomi politik pembangunan di negara-negara kepulauan kecil.

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi perubahan iklim di Fiji dapat diidentifikasi melalui keberadaan *multi-securitizing actor*, *referent object*, dan audiens yang relatif jelas. Akan tetapi, penelitian ini belum menemukan bukti yang cukup untuk menjelaskan secara langsung hubungan antara proses sekuritisasi tersebut dan kebijakan fiskal Fiji dalam bentuk peningkatan rasio utang publik pada periode 2020–2024. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan data sekunder yang tidak memungkinkan peneliti untuk mengakses secara langsung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Fiji dalam merumuskan kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan verifikasi langsung terhadap para pembuat kebijakan yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan utang publik, maupun kebijakan perubahan iklim di Fiji. Pendekatan tersebut penting untuk mengetahui apakah peningkatan rasio utang publik selama periode penelitian memang dipahami oleh para pengambil keputusan sebagai bagian dari upaya negara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, atau justru lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, tekanan fiskal negara, dan kebutuhan pembangunan nasional yang lebih luas.

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses sekuritisasi pada level konstruksi ancaman tidak selalu diikuti oleh munculnya hubungan yang eksplisit antara ancaman dan instrumen kebijakan yang digunakan negara. Dalam kasus Fiji, pemerintah berhasil mengonstruksikan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap masyarakat dan pembangunan nasional, namun penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan utang publik secara eksplisit dikonstruksikan sebagai *extraordinary measures*. Temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara konstruksi ancaman dan konstruksi solusi dalam proses sekuritisasi. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan mampu mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara konstruksi ancaman dan legitimasi kebijakan dalam teori Sekuritisasi, khususnya pada isu perubahan iklim dan kebijakan ekonomi negara. Kajian tersebut penting untuk memahami lebih dalam

mengenai batasan, dinamika, serta kondisi yang mempengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan proses sekuritisasi dalam praktik kebijakan publik.

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif terhadap negara-negara kepulauan kecil lainnya yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, seperti Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, maupun negara-negara Pasifik lainnya. Pendekatan komparatif tersebut penting untuk mengidentifikasi apakah pola yang ditemukan dalam kasus Fiji juga terjadi pada negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, studi komparatif juga dapat membantu menjelaskan apakah hubungan yang tidak eksplisit antara sekuritisasi perubahan iklim dan kebijakan fiskal merupakan fenomena yang khas terjadi di Fiji atau justru mencerminkan kecenderungan yang lebih luas di negara-negara kepulauan kecil yang menghadapi tekanan pembangunan dan ancaman iklim secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara sekuritisasi perubahan iklim, pengambilan keputusan fiskal, dan pembangunan nasional dalam konteks negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim.